**Diskresi Hakim Dalam Putusan Pencabutan Surat
Penolakan Perkawinan Di Masa Iddah Dalam Putusan
No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA.**

Novan Aidilla akbar*¹

¹Hukum, Universitas Islam Malang

*Email Correspondensi: novanaidilla@gmail.com

Abstrak. Pernikahan dalam periode iddah tidak bisa legal hingga berakhirnya waktu iddah. Berbeda dengan vonis Majelis hukum Tulungagung Nomer 302/Pdt.P/2023/PA. TA mengenai pembatalan surat penolakan menikah pada periode Iddah. Riset kepada putusan ini dilakukan lewat analisis referensi(riset referensi) yang dilakukan dengan memakai pendekatan hukum serta analisa kualitatif. Kesimpulan dari riset ini jika dasar hukum yang dipakai majelis hakim ialah Pasal 153 bagian(2) Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al- Qur' an. At. Thalaq ayat 4, dan KHI Pasal 53, yang dikenal dengan memakai tata cara temuan hukum(*rechtvinding*), di antara lain kesatu tata cara pemahaman sistematis serta metode *istimbath* yang dipakai guna mengenali jika waktu iddah X(Pemohon) bukan iddah mengandung akan tapi iddah qori, kedua tata cara alasan kepada Pasal 153 bagian 2 huruf c KHI guna mengenali siapa yang sudah membuntingi X(Pemohon) sekalian selaku dasar guna mencabut surat penolakan pernikahan dari KUA setempat serta ketiga silogisme kepada Pasal 53 KHI guna mengenali jika X (Pemohon) dengan A (bakal suami Pemohon) tidak terdapat hambatan buat melakukan pernikahan.

Kata Kunci : Penolakan Perkawinan, Iddah, nikah waktu Iddah.

Abstract. A marriage during the iddah period is not legal until the iddah period ends. This contrasts with the Tulungagung Legal Panel's ruling No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA concerning the annulment of a letter refusing to marry during the iddah period. Research into this ruling was conducted through reference analysis (reference research) using a legal approach and qualitative analysis. The conclusion of this research is that the legal basis used by the panel of judges is Article 153, Part (2) of Letter b of the Compilation of Islamic Law (KHI), the Qur'an. At. Thalaq paragraph 4, and KHI Article 53, which is known as using the legal discovery procedure (*rechtvinding*), among others, firstly the systematic understanding procedure and *istimbath* method used to identify that the iddah period of X (Applicant) is not the iddah of pregnancy but the iddah of qori, secondly the reasoning procedure for Article 153 part 2 letter c KHI to identify who has impregnated X (Applicant) as well as being the basis for revoking the marriage rejection letter from the local KUA and thirdly the

syllogism to Article 53 KHI to identify that X (Applicant) and A (Applicant's future husband) have no obstacles to getting married.

Keywords : *Rejection of Marriage, The Iddah, marriage during Iddah.*

Artikel history: Received: 20-06-2025, Revised:30-07-2025, Accepted:31-07-2025

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan memiliki kedudukan sentral sebagai manifestasi ibadah yang krusial, sekaligus sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan jalinan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Ini juga bertujuan untuk melestarikan eksistensi manusia melalui kelahiran keturunan sebagai penerus generasi. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah akad yang kokoh (misaqan ghaliza), yang diatur sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan berfungsi sebagai implementasi ibadah. Secara garis besar, perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan batiniah dan lahiriah antara pria dan wanita yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan orientasi pembentukan keluarga yang bahagia dan abadi.

Perkawinan, sebagai institusi yang diatur secara ilahiah, memiliki seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan hubungan antara pria dan wanita. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menetapkan persyaratan fundamental yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, yang meliputi syarat materil dan formil. Lebih lanjut, terdapat kondisi khusus yang berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan setelah perceraian, mengingat dampak yang ditimbulkan, terutama terkait dengan masa iddah bagi mantan istri.

Secara etimologis, istilah iddah berasal dari bahasa Arab, diturunkan dari kata adda-ya'uddu-'iddatan, yang bermakna 'menghitung' atau 'hitungan', dengan bentuk jamak 'idad'. Dalam konteks hukum Islam, iddah merujuk pada

periode penantian yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya. Tujuan utama dari masa iddah ini adalah untuk memastikan status kehamilan wanita tersebut, atau dalam kasus wanita yang telah mengalami menopause, sebagai bentuk ketaatan ritual (ta'abbud) terhadap ketentuan hukum Allah SWT.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa jika seorang wanita yang menceraikan suaminya ingin menikah lagi, maka ia harus menunggu hingga masa tunggu atau masa iddah berakhir dan perkawinan tersebut dilangsungkan sedangkan masa iddah nya belum berakhir. Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya menolak pernikahan kembali dengan menerbitkan surat penolakan pernikahan.

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA hari Kamis, 22 Juni 2023 mengenai perkara pencabutan surat penolakan perkawinan. Kasus ini bermula dari penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan surat penolakan perkawinan nomor B.388/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023, tertanggal 7 Juni 2023, terhadap perkawinan antara X (Pemohon) dan A (bakal suami Pemohon). Penolakan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa X (Pemohon) hamil dalam masa iddah, yang diinterpretasikan oleh KUA sebagai akibat dari hubungan badan dengan mantan suaminya, bersesuaian Pasal 153 ayat (3) Huruf d KHI mengenai masa iddah hingga kelahiran.

Penetapan kasus tersebut, diketahui bahwasannya X (Pemohon) statusnya janda cerai, yang dibuktikan dengan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 23 Maret 2023 dan Akta Cerai Nomor 284/AC/2023/PA.TA. Saat perceraian, X (Pemohon) berada dalam kondisi suci setelah hubungan badan (ba'da dhukul), dengan masa iddah yang dimulai pada 24 Maret 2023 dan berakhir pada 24 Juni 2023. Sebelum masa iddah berakhir, X (Pemohon) berencana untuk menikah dengan A (bakal suami Pemohon) dari Trenggalek. Keduanya telah menjalin hubungan sejak sebelum

perceraian X (Pemohon) dan bahkan telah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan kehamilan X (Pemohon) yang saat itu berusia dua bulan.

Karena X (Pemohon) tengah hamil, maka X (Pemohon) dan A (bakal suami Pemohon) ingin sesegeranya melakukan perkawinan. Sama halnya dengan bakal pengantin umumnya perkawinan persyaratam untuk melakukan perkawinan antara X (Pemohon) dan A (bakal suami Pemohon) sebagaimana diatur dalam “Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 harus terpenuhi terlebih dahulu akan tetapi Kepala KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung menolak untuk melaksanakan permohonan perkawainan yang dilakukan X (Pemohon) dan A (bakal suami Pemohon) dengan dilatar belakangi didapatinya persoalan persyaratan perkawinan, sesuai surat Kepala KUA Nomor: B.388/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023, tanggal 07 Juni 2023 dengan informasi yang diberikan Kepala KUA bahwa X dalam masa iddahnya ini lagi hamil. Perkawinan bisa dilaksanakan jika sesudah iddahnya X habis atau sesudah melahirkan.

X (Pemohon) kecewa karena diberikan surat penolakan tersebut karena para Pemohon memandang tidak terdapat halangan buat melaksanakan perkawinan baik bedasarkan ketetapan dari agama sedemikian itu pula peraturan yang sah. Secara hukum nikah keadaan berbadan dua tidak dilarang bersumber pada ketentuan Pasal 53 KHI. Maka, X (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan. Di dalam sidang Hakim memutuskan menetapkan seluruh petitum yang diajukan oleh X(Pemohon).

Tentu saja Majelis Hakim dalam perkara ini tidak hanya membaca teks-teks hukum formal, tetapi juga sumber-sumber non-hukum, dan berupaya keras untuk menetapkan landasan hukum dari berbagai sumber. Sebab, hakim perlu mengeluarkan putusan baru untuk mencari dasar hukum. Artinya, beberapa metode penemuan hukum (*rechtvinding*) dapat digunakan.

Hasil dari penemuan hukum tersebut dapat diketahui dari pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat diketahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu kehamilan X (Pemohon) ialah hasil hubungan badan di luar nikah yang dilakukan dengan A (bakal suami Pemohon) karena faktanya B (mantan suami Pemohon) telah pergi dan tak ada kabar dan tidak tahu dia pergi kemana sejak setahun lalu. Hal ini dipakai dasar mencabut penolakan perkawinan dari KUA Ngunut.

Akibat dari temuan hukum tersebut dapat ditentukan dari pertimbangan hukum pertimbangan hukumnya timbul dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni tidak terhitungnya kehamilan setahun yang lalu.

METODE

Tipe riset yang dipakai oleh periset yakni riset hukum normatif ialah riset hukum yang dilakukan dengan metode mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder (Soekanto, 2007). Di mana informasi sekunder yang dipakai terdiri dari materi hukum pokok, sekunder, serta tersier, alhasil riset ini terhitung riset daftar pustaka(*library research*) (Soekanto, 2006). Periset menggunakan tipe riset hukum normatif merupakan informasi yang diawasi berbentuk hukum pokok ataupun dokumen resmi dari Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA, maka teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan yuridis normatif yang mana metode riset yang merujuk pada materi hukum pokok berbentuk aturan-aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta tetapan majelis hukum dan aturan hukum hukum yang ada dalam warga (Ali, 2021). Metode analisis informasi dalam riset ini merupakan deskriptif analitis ialah periset mendeskripsikan terlebih dulu dengan cara analitis aktual serta cermat kepada masalah yang diawasi.

Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA Setelah memaparkan kasus tersebut, maka akan dianalisis kasus tersebut dengan menggunakan teori penemuan hukum (*rechtfinding*) dan memaparkan peraturan hukum yang akan menjadi pokok kajian sebuah kesimpulan kemudian diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini untuk menganalisis dan menelaah Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA mengenai penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan didalam masa iddahnya seorang wanita. Berdasarkan identitasnya, X (Pemohon) yang beralamat Dusun Umbutsewu RT 002 RW 002 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Persoalan ini diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka sudah tepat Pengadilan Agama Tulungagung berwenang untuk mengadili di tingkat pertama karena menjadi salah satu daerah yurisdiksinya. Sesudah melihat peristiwa dan fakta hukum yang dikemukakan dan diungkapkan dalam persidangan, Majelis Hakim harus memutuskan apakah hukum tersebut konsisten dengan penyelesaian perkara dalam merumuskan penalaran hukum.

Berdasarkan hukum, seorang hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya dan hakim berkewajiban menemukan hukumnya dengan cara berikhtiar memahami suatu aturan hukum yang kurang jelas. Meski dipersoalan ini hakim diberi kebebasan memutuskan perkara yang ditanganinya, namun dia harus selalu berpegangan dalam aturan yang ada, sehingga nantinya buah putusannya Hakim akan selalu berlandaskan aturan yang berhubungan dengan kasus tersebut (Mertokusumo, 2010).

Berdasarkan analisis Majelis Hakim terhadap fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari aturan yang berlaku yang mana terdapat

hubungan dengan kasus dan/atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar menjatuhkan putusan.

Hakim bisa turut serta melakukan suatu penemuan hukum, hakim bisa memilah dan memilih mana yang termasuk hukum dan mana yang tidak termasuk hukum. Scholten menjelaskan seorang Hakim ketika menerapkan aturan selalu *rechtvinding* (turut serta menemukan hukum). (Mahfiana, 2005). Riset ini, peneliti menganalisa apakah ada *rechtvinding* didalamnya.

Temuan hukum merupakan cara penyusunan hukum oleh Hakim ataupun petugas hukum yang lain yang ditugaskan guna implementasi peraturan hukum biasa pada kasus hukum aktual. Atau dengan kata lain temuan hukum ialah cara konkretisasi ataupun individualisme peraturan hukum (*das sollen*) yang bertabat biasa dengan mengenang akan kejadian aktual (*das sein*) spesifik.

Kekurangan Hukum bagi aliran temuan hukum seharusnya diisi oleh pengadil dengan pemanfaatan hukum- hukum logika (silogisme) sebagai dasar pentingnya. Disini bukan hasil temuan hukum yang menggambarkan titik pusat meski tujuannya merupakan menciptakan vonis melainkan tata cara yang dipakai. Alhasil periset mengikhtisarkan kalau dalam temuan hukum yang terutama merupakan bagaimana mencari serta menciptakan normanya untuk kasus nyata.

Pertimbangan hukum dalam penemuan hukum (*Rechtvinding*) penetapan pembatalan penolakan nikah yang digunakan pada masa Iddah dalam Putusan No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA. analisa peneliti antara lain:

1. Metode Interpretasi Sistematis (Logis) Dan Metode Istimbath

Metode Interpretasi Sistematis (Logis) merupakan menafsirkan peraturan perundangan-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum lain, sehingga berbagai ketentuan yang didalamnya terdapat ketentuan kesaling terhubung yang dapat menentukan suatu makna (Putro, 2011). selanjutnya analisis dalam penelitian ini terhadap Putusan No. 302/Pdt.P/2023/PA.TA, Hakim dalam menemukan dasar

hukum disesuaikan dengan cara pemahaman sistematis terkait penetapan waktu iddah yang harus dilalui oleh X (Pemohon).

Pertimbangan hukumnya diketahui Majelis Hakim mengkolaborasi beberapa peraturan secara beruntutan dimulai dari aturan hukum positif dan Hukum Islam diantara berlandaskan Surat At-Thalaq Ayat 4 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf b PP No. 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 153 Ayat (2) huruf b KHI, yang mengatur waktu iddah ketika haid yaitu 3 kali suci / 3 bulan dan jika tidak haid, waktu iddahnya 90 hari.

Setelah mendapat landasan hukumnya dalam hukum positif, maka hukum istimbas digunakan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hukum agama. Artinya, dilakukan dengan menetapkan (menggunakan) hukum Islam baik dari teks ayat Al-Quran maupun Kitab Suci. baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/pasti (qath'i)

Sebagaimana pendapat hukum dalam perkara ini digunakan pula dasar hukum Islam dimana firman Allah SWT tertuang didalam Surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai referensi untuk penentuan masa tanggu (iddah) yang harus dilakukan oleh X (Pemohon) yang pokok dari ayat ini ialah bagi istri yang ditalak selayaknya mengendalikan diri 3 kali bersuci atau 3 kali haid (mens). Ayat ini digunakan oleh Hakim karena ketentuan yang tercantum dalam ayat tersebut bisa dipergukan untuk cerai gugat (cerai yang dilakukan oleh istri) maupun cerai talak (cerai yang dilakukan oleh pihak suami).

Berdasarkan penafsiran sistematis pasal dan ayat di atas, maka iddah yang harus dialami X (pemohon) bukanlah iddah hamil, melainkan iddah quru (suci) begitu juga maksud pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut

Menimbang bahwa oleh karena sesudah putusan dijatuhkan {setelah terjadi perceraian X (Pemohon) dengan B (mantan suami)} X

(Pemohon) hanya mengalami dua kali masa suci (dua quru') berdasarkan didalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Firman Allah termuat di Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 4 maka masa iddahnya ditetapkan tiga bulan (90 hari).

Hasil kajian majelis hakim dengan metode penafsiran yang sistematis (logis), didasarkan pada penggunaan peraturan hukum yang terdiri dari beberapa pasal yang saling melengkapi, dan juga dijadikan rujukan ayat-ayat Al-Quran hal ini dapat ditentukan Hakim inkuisisi mengeluarkan temuan hukum untuk menentukan makna peraturan yang dipergunakan.

Menurut penelitian bahwa diterapkannya iddah quru' kepada X (Pemohon) karena selama dalam kehamilan X (Pemohon) yang tidak mengalami haid ketika menjalankan masa iddahnya yaitu dari masa iddah yang dihitung dari 3 (tiga) kali suci menjadi iddah quru' atau 90 (sembilan puluh)(Hasunah & Susanto, 2016).

Tepatnya sejak dikeluarkan Akta Cerai Nomor 284/AC/2023/PA.TA tertanggal 24 Maret 2017 dan berakhir tanggal 24 Juni 2023. Setekah habis masa quru' tersebut kemudian X (Pemohon) boleh melangsungkan perkawinan dengan A (bakalsuami Pemohon)(Jauharatun, 2016). Dalam hal kata quru' diatas sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika tidak mengalami haid.

2. Metode A Contrario (*Argument A Contrario*)

Metode A Contrario (*Argument A Contrario*) ialah menjelaskan makna Undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang berhadapan dengan sebuah kejadian atau peristiwa yang diatur dalam Undang-undang(Sutiyoso, 2012). Berdasarkan analisis ilmiah terhadap putusan tersebut metode ini digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki menghamili X (Pemohon) sehingga mendapatkan sebuah penjelasan mengenai status

kehamilan X (Pemohon) sebagai pondasi dasar Hakim diperuntukkan sebagai membatalkan surat penolakan perkawinan dikeluarkan pihak KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan persidangan ketentuan hukum Pasal 153 ayat 2 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan bahwa Jika putusnya perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan". Durasi masa iddah yang wajib dijalani oleh Pemohon (X) tidak dihitung berdasarkan kehamilan atau persalinan, melainkan masa iddah quru', yaitu selama 90 hari. Hal ini dikarenakan fakta persidangan menunjukkan bahwa kehamilan Pemohon (X) bukanlah hasil dari hubungan dengan suaminya, melainkan akibat dari hubungan di luar nikah dengan A (bakal suami Pemohon).

Aturan hukum terkait masa iddah hamil tidak dapat diterapkan pada Pemohon (X) karena kehamilannya bukan berasal dari hubungannya dengan sang suami, melainkan dengan individu lain, meskipun kehamilan tersebut terjadi dalam masa iddah Pemohon. Berdasarkan fakta ini, peneliti sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, surat penolakan perkawinan dalam masa iddah yang diterbitkan oleh KUA dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak terbukti keabsahannya, sebagaimana tertuang dalam putusan hukum yang relevan

"Menimbang bahwa berdasar pengakuan X (Pemohon) dan A (bakalsuami Pemohon) didepan persidangan bahwa kehamilan X (Pemohon) dan janin yang dikandung X (Pemohon) adalah hasil hubungan badan/seksual diluar nikah antara X (Pemohon) dengan A (bakal suami Pemohon) atas dasar suka sama suka. Sehingga janin yang dikandung oleh X (Pemohon) bukan hasil hubungan badan dengan B (mantan suami Pemohon) melainkan hasil hubungan badan dengan dengan A (bakal suami Pemohon) diluar nikah".

3. Silogisme

Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan X (Pemohon) memanfaatkan metode silogisme untuk menguji keabsahan fakta-fakta yang diajukan. Secara spesifik, premis minor berupa status kehamilan X (Pemohon) saat melangsungkan perkawinan dengan A (bakal suami Pemohon) dihubungkan dengan premis mayor, yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan Majelis Hakim untuk menganalisis dan memverifikasi apakah fakta-fakta yang dikemukakan dalam surat permohonan X (Pemohon) dapat dibuktikan dan dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga silogisme mengenai perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 silogisme mengenai perkawinan

Premis Mayor	Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Premis Minor	X (Pemohon) adalah seorang wanita yang hamil diluar nikah.
Konklusi (kesimpulan)	X (Pemohon) dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya A (bakalsuami Pemohon)

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), pernikahan dapat dilangsungkan antara seorang wanita hamil di luar nikah dengan pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya. Merujuk pada analisis silogisme yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kehamilan Pemohon (X) disebabkan oleh hubungan di luar nikah dengan calon suami Pemohon (A). Dengan demikian, A adalah pria yang menghamili X, sehingga tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan di antara keduanya. Oleh karena itu, pernikahan dapat dilangsungkan segera tanpa harus menunggu kelahiran anak.

Secara implisit, Pasal 53 ayat 2 menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban iddah bagi wanita hamil akibat perzinaan yang menikah dengan pria yang menghamilinya. Ayat ini memungkinkan perkawinan langsung antara wanita tersebut dengan pria yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Ghazaly (2008) dalam Fiqh Munakahat

“Menimbang bahwa selanjutnya tentang rencana pernikahan X (Pemohon) yang sedang hamil diluar nikah dengan A (bakal suami Pemohon) seseorang menghamili yang dijadikan bakal suami berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dapat mengesahkan perkawinan tersebut tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya”.

Drowkin dalam hal ini mengingatkan kita bahwa dalam suatu perkara tertentu, Hakim tidak hanya menangani permasalahan teknis (prosedural), namun juga substansi hukum. Ketika seorang Hakim mempertanyakan etika, ia tidak lagi menanyakan langkah-langkah teknis penyelesaian hukum, tetapi juga tentang isi undang-undang, seperti apakah adil. Upaya hakim dalam membaca tidak hanya dokumen hukum formal tetapi juga bahan non hukum serta berupaya menemukan hukum dari berbagai sumber hukum patut diapresiasi. Hal ini terjadi karena semua kasus, baik hard maupun clear, pada dasarnya adalah kasus untuk menemukan hukum yang tepat.

Pertama mengenai pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung berbunyi: “Menyatakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ngunut Kabupaten Tulunagung Nomor B.388/Kua.13.04.09/PW.01/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sehubungan dengan itu, disebutkan bahwa ketentuan ketentuan hukum mengenai masa iddah kehamilan yaitu iddah kehamilan

sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak berlaku lagi terhadap X (Pemohon) sebab kmeskipun X (penggugat) hamil pada masa Iddah, namun kehamilan tersebut terjadi pada A (calon suami penggugat) dan bukan pada suaminya. Artinya, KUA tidak terbukti menolak perkawinan pada masa Idda dan belum dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan prinsip masalah mursalah, yang mendefinisikan kemaslahatan sebagai upaya mewujudkan kebaikan dan menyingkirkan kesulitan bagi umat manusia, pencabutan surat penolakan perkawinan antara Pemohon (X) dan calon suaminya (A) mengindikasikan terpenuhinya segala persyaratan yang diperlukan. Dengan demikian, tidak ada lagi hambatan substantif yang menghalangi pelaksanaan perkawinan tersebut.

Putusan ini secara gamblang memberikan solusi bagi Pemohon (X) dengan memfasilitasi pernikahan sahnya dengan calon suami (A). Hal ini memastikan status perkawinan yang sah bagi janin yang dikandung, baik secara agama maupun negara, sehingga meringankan beban Pemohon. Lebih lanjut, terwujudnya ikatan perkawinan akan menciptakan ketenangan dan ketenteraman bagi Pemohon (X), karena ia akan mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan dari suaminya. Secara esensial, keputusan ini merupakan upaya untuk membebaskan Pemohon (X) dari kesulitan dan tanggung jawab tunggal dalam menjaga serta menyelamatkan bayi yang sedang dikandungnya.

Dalam konteks pelaksanaan perkawinan, sebagaimana termaktub dalam amar putusan, Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, diinstruksikan untuk secara resmi melangsungkan dan mencatatkan pernikahan antara X (Pemohon) dan A (calon suami Pemohon).

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1, dimungkinkan bagi seorang wanita hamil di luar pernikahan untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Dengan demikian, kasus kehamilan Pemohon yang diakibatkan oleh hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, A, tidak menjadi halangan untuk segera melangsungkan pernikahan. Perkawinan dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak terlebih dahulu.

Alhasil perkawinan antara keduanya tidak ada faktor yang membatasi sebab dalam hukum positif ataupun hukum Islam menikahkan antara perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya ialah suatu bukti serta menerangkan kalau X(Pemohon) itu bukan terhitung waktu iddah hamil sebab dilakukan dengan suaminya.

Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman yang menerangkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dan hidup di masyarakat. Pertimbangan hukum oleh Hakim dapat dikatakan tepat dalam menggunakan akal dan intelektualnya untuk melakukan penemuan hukum sebagai upaya untuk memberikan penetapan secara adil yang dapat menciptakan kemaslahatan.

Selain karena pertimbangan hukum perkara dalam hukum Istishrah, putusan ini mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu mengikutsertakan keturunan dari anak yang dikandungnya (calon suami pemohon) karena memenuhi ketentuan hukum di Indonesia yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, kelebihan dari ketentuan ini adalah anak akan dianggap sah menurut hukum Indonesia dan akan menjamin hak-hak keperdataan anak di kemudian hari, antara lain: agar hak-hak tersebut

dilindungi oleh undang-undang pemerintah Indonesia, seperti memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Keputusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA, yang mengesampingkan penolakan pernikahan saat masa iddah oleh KUA Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, terbukti selaras dengan prinsip hukum yang berlaku. Ketetapan ini berlandaskan pada kerangka hukum positif dan hukum Islam yang menjadi dasar hukum di Indonesia.

Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.TA menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui metode tafsir dan metode *istinbath*. Penerapan metode-metode ini bertujuan untuk menetapkan bahwa masa iddah yang harus dijalani oleh Pemohon (X) adalah iddah quru' (suci), bukan iddah kehamilan. Verifikasi ketiadaan hambatan pernikahan antara X (Pemohon) dan A (calon suami Pemohon), serta validitas perkawinan tanpa perlu menunda kelahiran anak, ditegaskan melalui aplikasi tiga silogisme. Hal ini juga mempunyai manfaat untuk melindungi hak-hak sipil anak yang belum dilahirkan untuk mendapatkan akta kelahiran, dokumen keluarga, dan dokumen identitas, karena dilindungi secara hukum oleh pemerintah Indonesia.

B. SARAN

Penulis berharap putusan serupa dapat menjadi acuan bagi pengadilan dan Kantor Urusan Agama agar lebih cermat dalam menafsirkan aturan mengenai masa iddah, sehingga tidak menimbulkan penolakan perkawinan yang keliru. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih memahami ketentuan hukum perkawinan agar dapat menghindari sengketa serupa di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Hasunah, U., & Susanto, S. (2016). *Iddah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53*.
- Jauharatun, J. (2016). Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(2), 158–177.
- Mahfiana. (2005). *ilmu hukum*. Ponorogo:Stain Ponorogo Press.
- Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum.* , Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Putro, W. D. (2011). Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. *Disertasi, Universitas Indonesia*, 184.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. *(No Title)*, 52.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sutiyoso. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta:UIN Press.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman